

DOKUMEN USULAN PERPANJANGAN KKPR

Kegiatan Berusaha

- A. Surat permohonan perpanjangan KKPR yang disampaikan oleh pemegang KKPR kepada
1. Menteri ATR/Kepala BPN c.q. Direktur Jenderal Tata Ruang dengan tembusan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang; atau
 2. Kepala Daerah (gubernur/bupati/wali kota) c.q Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan tembusan Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- Sesuai dengan penerbit KKPR sebelumnya, yang memuat informasi.
1. Nomor, tanggal, dan perihal surat;
 2. Alasan permohonan perpanjangan KKPR (mengacu pada kriteria perpanjangan KKPR);
 3. Informasi nomor dan tanggal KKPR yang dimohonkan perpanjangan;
 4. Total luas tanah yang sudah dimiliki/dikuasai dan kebutuhan perpanjangan KKPR; dan/atau
 5. Tautan dokumen usulan perpanjangan KKPR
- B. Dokumen KKPR yang dimohonkan perpanjangan;
- C. Bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang dilampirkan dengan peta;
- D. Koordinat lokasi tanah yang sudah dimiliki/dikuasai;
- E. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan/atau
- F. Surat kuasa apabila diperlukan.

CHECKLIST PERPANJANGAN KKPR				
Dokumen Usulan Perpanjangan KKPR		Jenis KKPR		
		1	2	3
		KKPR untuk Kegiatan Berusaha	KKPR untuk Kegiatan Nonberusaha	KKPR untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional
1.	Surat permohonan pemutakhiran KKPR	√	√	√
2.	Dokumen KKPR yang dimohonkan perpanjangan	√	√	√
3.	Bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang dilampirkan dengan peta (Ketentuan penyampaian bukti kepemilikan/penguasaan tanah mengacu pada Lampiran VI)*	√	√	√
4.	Koordinat lokasi tanah yang sudah dimiliki/dikuasai dengan format .shp	√	√	√
5.	Dokumen rencana pengadaan tanah (jika tersedia)	X	√	√
6.	Surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap kebenaran data dan informasi yang disampaikan	√	√	√
7.	Surat kuasa (apabila diperlukan)	√	√	√

CATATAN : LINGKARI SALAH SATU JENIS PERPANJANGAN KKPR YANG DIAJUKAN

*) Contoh terlampir

LAMPIRAN VI
 SURAT EDARAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
 RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR : 3/SE-PF.01/I/2025
 TANGGAL : 31 JANUARI 2025

A. TABEL DAFTAR BUKTI PEMILIKAN/PENGUASAAN TANAH ... (DIISI NAMA PELAKU USAHA)

Nomor KKPR :

Tanggal Penerbitan KKPR :

No	Dasar Perolehan Atas Tanah		Letak Tanah				Keterangan
	Asal Pemilikan/Penugasan	Bukti Pemilikan/Penguasaan	NIB	Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Keterangan:

- (1) Diisi nomor urut
- (2) Diisi keterangan asal pemilikan/penguasaan tanah
- (3) Diisi jenis bukti pemilikan/penguasaan beserta nomornya (contoh: HGU 00048; Leter C Desa Nomor 6797, Persil Nomor 77, Blok K; AJB Nomor ...; dan lain sebagainya)
- (4) Diisi 5 digit Nomor Identifikasi Bidang (NIB)
- (5) Diisi desa lokasi bidang tanah (contoh: Desa Pidodo Wetan)
- (6) Diisi kecamatan lokasi bidang tanah (contoh: Kecamatan Patebon)
- (7) Diisi luas bidang tanah (Ha/m²)
- (8) Diisi keterangan (apabila diperlukan)

B. FORMAT INFORMASI ATRIBUT TABEL KOORDINAT LOKASI DALAM FORMAT SHP

[illegible]